

# LAPORAN KINERJA (LKJ)

TRIWULAN II

▶ 2021

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Bitung, 12 Juli 2021

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Donny Muhammad Faisal, S.St.Pi, S.Pi, M.Si  
NIP. 19790502 200212 1 001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2021 terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 111,17 % Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 10 Indikator Kinerja dapat tercapai Hijau, 2 Indikator Kinerja tidak tercapai sesuai target sehingga capaiannya berwarna kuning dan 8 indikator Kinerja belum dapat dinilai karena baru akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan IV tahun 2021.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp44,3 miliar dengan realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2021 Rp16,4 miliar atau 36,94%.

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II tahun 2021 kiranya mampu menggambarkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021 beserta capaiannya baik kinerja maupun anggaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan ke depan.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	8
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja	18
3.3 Akuntabilitas Anggaran	51
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi	52
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	12
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2021	15
Tabel 3	Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II 2021	19
Tabel 4	Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021	19
Tabel 5	Hasil pengawasan Unit Usaha yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak Triwulan II tahun 2021 lingkup Pangkalan Bitung	26
Tabel 6	Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021	27
Tabel 7	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021	30
Tabel 8	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya bukan melalui Simwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021	31
Tabel 9	Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2021	37
Tabel 10	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021	38
Tabel 11	Penanganan TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	39
Tabel 12	Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	41
Tabel 13	Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	43
Tabel 14	Hasil Survey IKM SLO TW II	47
Tabel 15	Hasil Survey IKM LVHPI TW II	48
Tabel 16	Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan II Tahun 2021	51

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang	25
Gambar 4	Pengamanan Terduga Pelaku <i>Destructive Fishing</i> di Wilker PSDKP Bangkeplut	34
Gambar 5	Bukti Pengaduan Masyarakat	35
Gambar 6	Kegiatan PULBAKET terkait laporan masyarakat	36

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan *“good governance”*.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Triwulan II tahun 2021 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

### 1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
  - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
  - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
  - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
  - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
  - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
  - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
  - b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
  - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
  - b. Eksploitasi mangrove.
  - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

#### **1.4. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

- a. Kepala Pangkalan

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

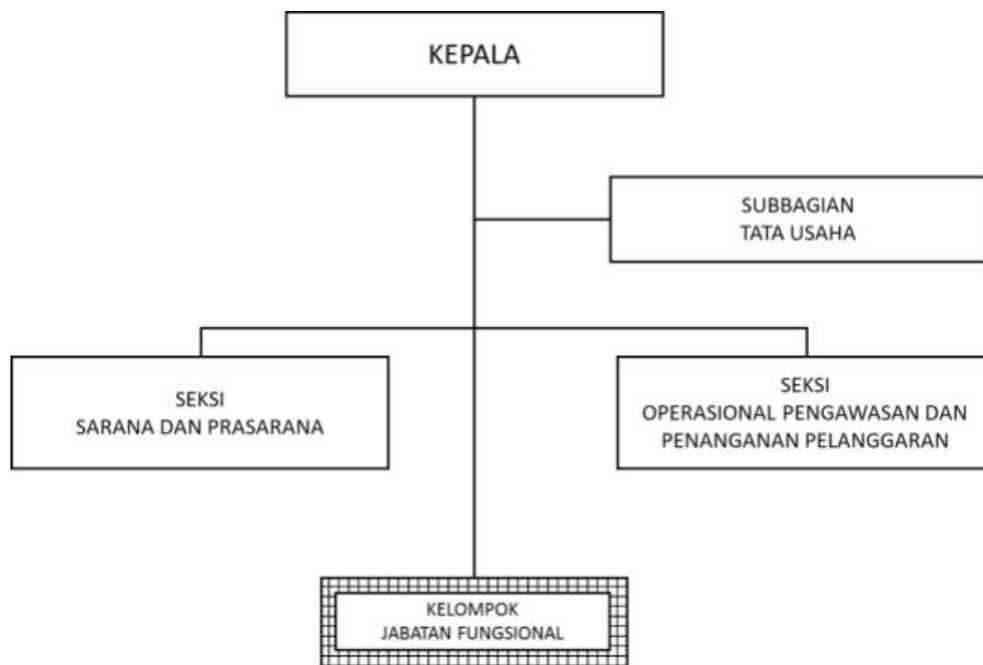
d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsional pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung



Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung



Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. Pangkalan PSDKP Bitung, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
- b. Satwas SDKP Gorontalo, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. Satwas SDKP Kendari, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d. Satwas SDKP Gorontalo Utara, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e. Satwas SDKP Makassar, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f. Satwas SDKP Takalar, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. Satwas SDKP Mamuju, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP PolewaliMandar.

## **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021;

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021; dan
4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-24 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 - 2024.

#### Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

##### 1. Visi

“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

##### 2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

##### 3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (sovereignty) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

##### 4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2019-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan

pengukuran kinerja. Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit Eselon I) yang menghasilkan hasil (outcome), dan sasaran kegiatan (unit Eselon II) yang menghasilkan keluaran (output).

Jika menggunakan pendekatan tersebut maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP; dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

Di sisi lain, pendekatan *balanced scorecard* (BSC) adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perspektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective*. Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan BSC maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Stakeholder perspective: "Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan".
- b. Customer perspective: "Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan".
- c. Internal Process perspective
  - 1) Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif;
  - 2) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif.
- d. Learning and growth perspective
  - 1) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang profesional dan berintegritas;
  - 2) Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses;
  - 3) Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
  - 4) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel.

## 5. Peta Strategi dan Sasaran Strategis

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

### a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

### b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

### c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (value chain).

### d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran strategis merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2021 yang telah ditentukan sebelumnya.

## **2.2. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
  - a. Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat
  - b. Operasi Kapal Pengawas
  - c. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
  - d. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat
  - e. Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
  - b. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
  - a. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
  - b. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
  - c. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
  - d. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
  - e. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
  - f. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
  - a. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - b. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - c. Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - d. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - a. Layanan Perkantoran
  - b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
  - c. Layanan Umum
  - d. Layanan Sarana Internal
  - e. Layanan SDM
  - f. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk: menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,79
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,82

5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP Bitung	6. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		7. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	8. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		9. Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		12. Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	73
		14. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
		15. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	1
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	84
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89
	20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	86	

## 2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)  
Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi *Aplikasi Kinerjaku* yang merupakan *aplikasi* berbasis informasi teknologi.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 111,17. Terdapat 20 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 10 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 2 indikator kinerja tercapai (kuning) 8 Indikator Kinerja belum dapat di ukur karena baru akan diukur capaian kinerjanya pada Triwulan berikutnya ditahun 2021. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, sebagaimana yang ada pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Validasi	Target (Tahun)	Target TW II	Capaian TW II	%
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	IKS.01.01	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	95	50	100	120
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	IKS.02.01	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	100	100	100	100
3	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	IKS.03.01	Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lead Proses	71	71	100	120

4	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	IKS.04.01	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	1,79	0,63	1,56	120
5	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	IKS.04.02	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	0,82	0,29	0,24	82,76
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	IKS.05.01	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	100	0		
7	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	IKS.05.02	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	100	0		
8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	IKS.06.01	Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	93	52	95,00	120
9	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	IKS.06.02	Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	93	50	93,29	120
10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.01	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INDEKS	Maximize	Lag Outcome	80	80	84,95	106,19
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.02	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INDEKS	Maximize	Lag Outcome	80	80	84,95	106,19
12	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.03	Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	75	0		

13	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.04	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	73	65	69,24	106,52
14	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	90	0	0	
15	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.06	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INOVASI	Maximize	Lead input	1	0	0	
16	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.07	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	72,5	0	0	
17	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	72,5	0	0	
18	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.09	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	84	84	100	119,05
19	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	89	80	71,85	89,81
20	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	86	0		

(kinerjaku.kkp.go.id tanggal 14 Juli 2021)

Warna	Keterangan
Baik	>= 100
Cukup	70 - < 100
Kurang	<70
Belum ada penilaian	
Belum Input Capaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II tahun 2021, telah dilakukan pengukuran terhadap 12 (dua belas) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, 10 indikator kinerja yang capaiannya  $\geq 100\%$  target kinerja pada Triwulan II, 2 (Dua) indikator kinerja persentase capaiannya antara 70% s.d 100% dan 8 (delapan) indikator kinerja Pangkalan PSDKP Bitung belum dilaksanakan pengukuran capaiannya.

Capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2020. Capaian skor kinerja Triwulan II tahun 2021 adalah 111,17% mengalami kenaikan 8,58% dari 102,59% pada Triwulan II tahun 2020.

### **3.2. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

#### **Sasaran Kegiatan 1:**

#### ***Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan***

Capaian Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan didukung dengan IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan II tahun 2021 adalah 120%.

#### **IKU1 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Target penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada Triwulan II tahun 2021 adalah 50%, tercapai 100% dengan presentase capaian kinerja 120% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 948.000.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 165.297.850. realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah

17,43%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-1 sebesar 99,85% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-1 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-1 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Tabel 3. Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2021	
		Target	Realisasi
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	persentase	50%	100%

Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi
- Pengawasan pengelolaan jasa kelautan
- Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan
- Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
- Pengawasan *destructive fishing*

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Jumlah Lembaga yang diperiksa	Presentase Capaian Pemeriksaan Triwulan II
1.	Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi	1	100
2.	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan	3	100
3.	Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	6	100
4.	Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan	7	100
5.	Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi	0	0
6.	Pengawasan <i>destructive fishing</i>	21	100
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung		<b>38 (Lembaga)</b>	<b>100</b>

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja di Triwulan II tahun 2021, sebagai berikut:

**1. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya**

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung sampai dengan Triwulan II 2021 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada triwulan II yaitu pengawasan terhadap CV. Sumber Bahari Mandiri yang merupakan unit usaha Pengumpul, Penampung, Pengolahan, dan Pemasaran Teripang, Rumput Laut, Perut Ikan, Sirip Ikan Hiu, Abalone, dan Karang yang tidak dilindungi, unit usaha tersebut beralamat di Jln. Perkamil Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado - Sulawesi Utara. Pengawasan jenis ikan dilindungi di CV. Sumber Bahari Mandiri meliputi pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan dan jenis ikan olahan, hasil pemeriksaan terhadap CV. Sumber Bahari Mandiri Dokumen perizinan lengkap dan sesuai, adanya kesesuaian jenis ikan dan diolah, adanya kesesuaian kuota ekspor jenis ikan dilindungi yang diolah.

Selama periode triwulan II Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan penanganan terhadap jenis ikan yang dilindungi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa Tanggal 27 April 2021 Pukul 19.40 Wita Polsus PWP3K Wilker PSDKP Polewali Mandar Menerima Laporan via WA An. Andi Zulfikar (Kelompok Pemerhati Penyu) terkait video jual beli Telur Penyu di Pasar bungi Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis 29 April 2021 Pukul 08.00 Wita Polsus PWP3K Wilker PSDKP Polewali Mandar menuju lokasi pasar Bungi dan di lapak An.Rabuana ditemukan sebutir telur Penyu yang masih berada didalam kantong kresek kemudian Polsus PWP3K memberikan arahan kepada saudara An.Rabuana dan pedagang yang ada di sekitarnya bahwa Telur Penyu yang dijual adalah jenis hewan dan seluruh turunannya dilarang sesuai Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999. Selanjutnya saudara An.Rabuana dibawa ke Kantor Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan untuk diminta membuat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
2. Wilker PSDKP Mamuju Utara pada tanggal 8 Mei 2021 bersama Ikatan Pemuda Peduli Lingkungan (IPPL) Kab. Pasangkayu melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di Pasar Smart Pasang Kayu dan lokasi diduga tempat bertelurnya/pengambilan telur penyu. Hasil kegiatan diperoleh salah

seorang penjual ikan a.n Nuni Tajawi umur 44 Tahun alamat Lingk. Labuang Pasangkayu menjual telur penyu 15 butir. Kemudian dilakukan sosialisasi, membagikan brosur terkait larangan penangkapan/pemasaran penyu & ikan jenis lain yang dilindungi, memberikan teguran ke pelaku untuk tidak menjual telur dan daging penyu.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 62,500,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 15.416.250 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 24,67%.

## **2. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya**

- a. Telah dilakukan pengawasan terhadap 1 (satu) pelaku usaha Pengolahan dan penjualan Garam konsumsi beryodium di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pengawasan terhadap pelaku usaha penambangan pasir laut CV. Kristal Garamindo pada tanggal 29 April 2021 yang beralamat di Jl.Pahlawan Ruko Pasar Karisa No.5, Kel. Ampoang Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan . Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, perusahaan tersebut telah memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai.
- b. Telah dilakukan pengawasan terhadap 2 (Dua) pelaku usaha wisata bahari di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 29 April 2021 di Sunari Beach Resort yang beralamat di Dusun Tanah Bau, Kel.Bontotangga, Kec.Bonto Haru, Kab.Selayar, Prop.Sulawesi Selatan. Jenis usaha Cottage, rumah makan, diving, dan Spa, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
  - Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 05 Mei 2021 di La Merry Resort yang beralamat di Tarabitan Likupang Barat, Kab.Minahasa Utara (SULUT). Jenis usaha Hotel and Resort, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 125,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 31.680.900, dan realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 25,34%.

### **3. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya**

Telah dilakukan pengawasan terhadap 6 (enam) unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut pada Triwulan II 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- **Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir**

Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir pada tanggal 31 Mei 2021 di PT. Pulisan yang beralamat di desa kinunang kecamatan likupang barat, kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha Resort, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

- **Pengawasan unit usaha pengelolaan ruang laut nasional**

Telah dilaksanakan pengawasan terhadap 2 (Dua) pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II 2021 sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 05 Mei 2021 di CV Sunmoon Platform yang beralamat di Jaga 1, Kalinaun, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara. Jenis usaha perhotelan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
2. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 09 April 2021 di PT. Manado Korin Paradise yang beralamat di desa maen kecamatan likupang timur kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha perhotelan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.

- **Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil**

Telah dilaksanakan pengawasan terhadap 3 (Tiga) pelaku usaha Pulau Pulau Kecil dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II 2021 sebagai berikut:

1. Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil pada tanggal 12 Juni 2021 di PT. Bastianos yang beralamat di Desa lihunu, kecamatan likupang timur, kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha resort/penginapan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
2. Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil pada tanggal 12 Juni 2021 di PT Coral Eye yang beralamat di Desa lihunu jaga VI kecamatan likupang timur kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha resort/penginapan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
3. Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil pada tanggal 12 Juni 2021 di UD Cahaya Mutiara Manado yang beralamat di Desa Basaan kecamatan

Ratatotok kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis usaha resort/penginapan, dokumen perizinan tidak lengkap dan tidak sesuai

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 135,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp26.593.000, realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 19,69%.

#### **4. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya**

Hasil kegiatan pada triwulan II 2021 ini telah dilaksanakan pengawasan terhadap 7 (Tujuh) unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Marina Nusantara Selaras pada tanggal 05 Mei 2021 yang beralamat di Kelurahan Manembo-nembo Kec, Matuari, kota Bitung. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- b. Pengawasan Industri Makanan dan Masakan Olahan ikan PT Indofood Sukses Makmur CBP Bitung pada tanggal 17 Mei 2021 yang beralamat di JL. Walanda Maramis Madidir Weru Ling I, Pakadoodan, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 1°26'34.7"N 125°10'30.5"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- c. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Manadomina Citrataruna pada tanggal 19 Mei 2021 yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung 1°26'19.0"N 125°08'54.0"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
- d. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Anping Seafood Indonesia pada tanggal .. Mei 2021 yang beralamat di Kelurahan Manembo nembo bawah, kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara 1°25'22.48"N 125°07'25.33"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
- e. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Indofood Sukses Makmur pada tanggal 28 Mei 2021 yang beralamat di JL. Walanda Maramis Madidir Weru Ling I, Pakadoodan, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 1°26'34.7"N 125°10'30.5"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- f. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Cargill Indonesia-Amurang

pada tanggal 9 Juni 2021 yang beralamat di JL. Trans Sulawesi, kecamatan Amurang Barat 1°11'34.7"N 124°33'18.2"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).

- g. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Tri Mustika Coko Minaesa pada tanggal 16 Juni 2021 yang beralamat di jalan raya Amurang Kotamobagu Doloduo KM 90 desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, kabupaten Minahasa Selatan 01°11'02.1" LU dan 124°30'18.3"BT. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 158.000.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp23.316.000, realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 14,75%.

#### **5. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya**

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP memiliki target 17 (tujuh belas) kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) Taman Wisata Perairan Gili Matra (NTB); 2) Taman Nasional Perairan Laut Sawu (NTT); 3) Taman Wisata Perairan Kapoposang (Selawesi Selatan); 4) Taman Wisata Perairan Pulau Pieh (Sumatera Barat);

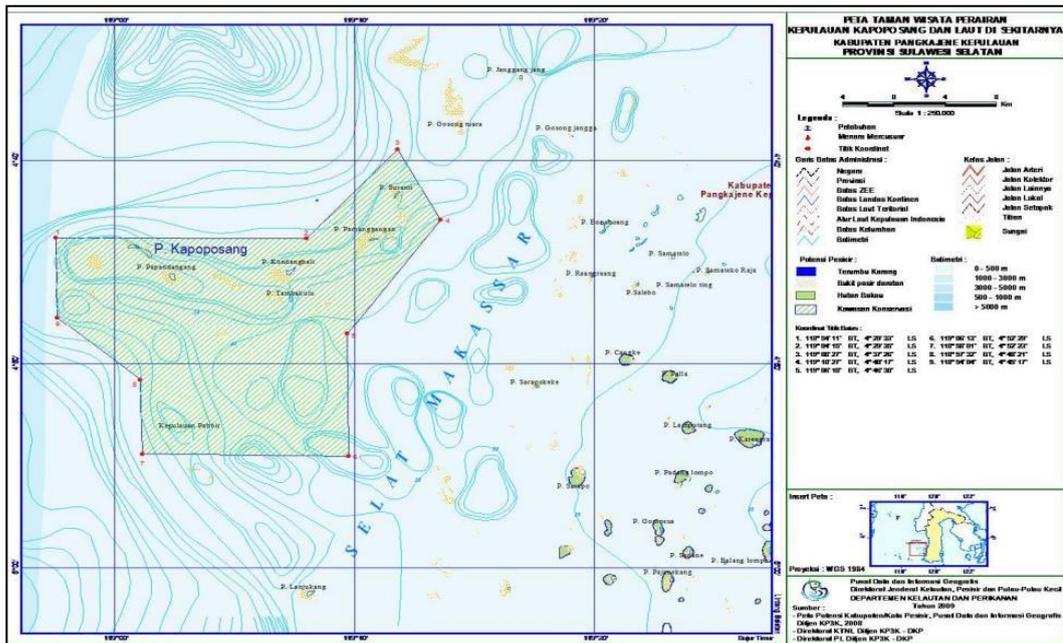
5) Taman Wisata Perairan Anambas (Kepulauan Riau); 6) SAP Raja Ampat (Papua Barat);

7) SAP Waigeo (Papua Barat); 8) SAP Aru Bagian Tenggara (Maluku); 9) Taman Wisata Perairan Padaido (Papua); 10) Taman Wisata Laut Banda (Maluku); 11) Taman Nasional Karimun Jawa ; 12) Taman Nasional Laut Bunaken; 13) Taman Nasional Laut Wakatobi;

14) Taman Nasional Laut Takabonerate; 15) Taman Nasional Teluk Cendrawasih; 16) Taman Nasional Laut Togean; dan 17) Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.

Angka 1 s/d 10 merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan angka 11 s/d 17 merupakan kawasan konservasi yang menurut rencana akan diserahkan pengelolaannya oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3. Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang



Pengawasan kawasan konservasi perairan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

TWP Kapoposang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan berada di WPP 713 dan EL 8 dengan luasan 50.000 ha, dasar hukum pengelolaan di atur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 66 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009, TWP Kapoposang telah dialihkan ke KKP dengan BA Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor: BA.108/ Men.KP/III/2009. Potensi TWP Kapoposang terdiri dari: terumbu Karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, penyu.

Tidak ada kegiatan pengawasan Kawasan konservasi yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2021.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 340.000.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 42.111.200, realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 12.39%.

## 6. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Hasil kegiatan pengawasan di Triwulan II tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel5. Hasil pengawasan Unit Usaha yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak Triwulan II tahun 2021 lingkup Pangkalan Bitung.

No	Pelaku Usaha		Jenis Kegiatan	Lokasi	Hasil Pengawasan
1.	KM. Tanpa Nama (IRWAN THIIHA alias IWAN)	07 April 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Pulau Peling, Kab Banggai Kepulauan	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
2	Ferdianto	10 Mei 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Utara	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
3	Ferdianto 2	10 Mei 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Utara	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
4	Kapal Tanpa Nama (Sigit Yahya)	10 Mei 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Utara	Kapal tanpa dokumen
5	Kapal Tanpa Nama (Rasyid)	10 Mei 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Utara	Kapal tanpa dokumen
6	Kapal Tanpa Nama (Rasyid)	7 Mei 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Kotabunan	Kapal tanpa dokumen
7	Kapal Tanpa Nama	7 Mei 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Kotabunan	Kapal tanpa dokumen
8	Kapal Tanpa Nama	7 Mei 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Kotabunan	Kapal tanpa dokumen
9	Kapal Tanpa Nama (Jims Katiandagho)	14 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Bitung	Kapal tanpa dokumen
10	Kapal Tanpa Nama (Rafel)	14 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Likupang	Kapal tanpa dokumen
11	Kapal Tanpa Nama (Datsote)	14 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Likupang	Kapal tanpa dokumen
12	Kapal Tanpa Nama (Syahrul)	14 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Likupang	Kapal tanpa dokumen
13	Kapal Tanpa Nama (Hamid Tsanuraga)	14 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Likupang	Kapal tanpa dokumen
14	Kapal Tanpa Nama (Jumadi Gabriel)	14 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Bitung	Kapal tanpa dokumen
15	Kapal Tanpa Nama (Jufri Rapalawa)	15 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Bitung	Kapal tanpa dokumen
16	Kapal Tanpa Nama (Marwan Wowor)	15 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Bitung	Kapal tanpa dokumen

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 127.500.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 26.180.500, realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 20,53%.

## Sasaran Kegiatan 2:

### Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Capaian Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 2 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan II tahun 2021 adalah 100%.

### **IKU2 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau). IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun sebelumnya. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.671.149.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan juni 2021 adalah Rp 407.233.596 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 24,13%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-2 sebesar 99,76% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-2 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-2 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

*Tabel 6. Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021*

Indikator Kinerja	Satuan	2021	
		Target	Realisasi
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	<b>persentase</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil agregasi capaian 4 (empat) kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, yaitu:

- Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa

kepatuhannya.

- Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya.

Hasil capaian Triwulan II tahun 2021 keempat kegiatan pengawasan tersebut, sebagai berikut:

#### **1. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya**

Pada Triwulan II tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap 17 Unit pengolahan ikan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dengan tingkat presentase penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan 100%.

Telah dilakukan pengawasan terhadap 17 (Tujuh Belas) unit usaha pengolahan hasil perikanan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- CV. Camar Laut dengan alamat Jl. Raja Wadi Polapa, Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, jenis produk Ikan Tuna.
- PT. Nichindo Manado Suisan dengan alamat Jl. Trans Sulawesi KM. 52 Kel. Pondang, Lingkungan VII, Kec. Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, jenis produk Ikan kayu, Tepung Ikan.
- PT. Brilliant Ocean Fish dengan alamat Lingkungan II RT. 004, Kelurahan Aertembaga II, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, jenis produk ikan Tuna beku.
- PT. Sari Malalugis dengan alamat Kel. Madidir Weru. Lingkungan I, Kel. Madidir Weru, Kec. Madidir, Kota Bitung, jenis produk Ikan beku.
- PT. Sari Cakalang dengan alamat Madidir Weru Lingkungan IV, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, jenis produk ikan Tuna segar dan beku.
- PT. Shing Sheng Fa Ocean dengan alamat Madidir Lingkungan III, Kelurahan Paceda, Kecamatan madidir, Kota Bitung, jenis produk ikan beku.
- PT. Manadomina Citrataruna dengan alamat Kel. Wangurer Timur, Lingk I, Kec. Madidir, Kota Bitung, jenis produk ikan kayu.
- PT. Anping Seafood Indonesia dengan alamat Jl. Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung, jenis produk Steak Tuna Beku, Fillet Tuna Beku.
- PT. Triko Bina Nusantara dengan alamat Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Buton, jenis produk Tuna loin dan ikan beku.
- PT. Chen Woo Fishery dengan alamat Jalan Kima IV Blok k9/B-2, Tamalanrea, Daya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241, jenis produk ikan

beku dan ikan segar.

- CV. Sumber Bahari Mandiri dengan alamat Jl. Kapasa Raya No.38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Sirip Hiu Kering.
- Poklahsar Zahra dengan alamat BTN Pole Indah Mas, Kel. Darma, Kec. Polewali Kab. Polman, jenis produk abon ikan, amplan.
- KUB Gowes Pantai dengan alamat Desa Rea, Polewali Kab. Polewali Mandar, jenis produk Daging Rajungan beku.
- Juhria Giu dengan alamat Ds. Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk Daging Rajungan beku.
- Hediando dengan alamat Lorong Pemotongan Sapi, Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau, jenis produk Tuna loin segar.
- Wa ode Hestiana dengan alamat Jl. Wakaaka Kel. Kaabula, Baubau, jenis produk ikan beku.
- UD. Teri dengan alamat Ds. Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk ikan kering.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 349,292,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 172.054 700, realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 49,26%.

## **2. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya**

Telah dilakukan pengawasan terhadap 6 (enam) unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya, dengan hasil presentase pemeriksaan kegiatan distribusi hasil perikanan capaiannya 100% dengan rincian sebagai berikut:

- PT. Brilliant Ocean Fish yang beralamat di Lingkungan II RT. 004, Kelurahan Aertembaga II, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, jenis produk tuna beku dengan tujuan ekspor negara Amerika melalui kapal laut/container.
- PT. Sari Cakalang dengan alamat Madidir Weru Lingkungan IV, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, jenis produk tuna segar dengan negara tujuan ekspor Thailand melalui kapal pesawat.
- CV. Camar Laut dengan alamat Jl. Raja Wadi Polapa, Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, jenis produk Ikan Tuna Segar, negara tujuan ekspor Singapura melalui kapal pesawat.
- PT. Anping Seafood Indonesia dengan Jl. Manembo-Nembo, Kecamatan

Matuari Kota Bitung, jenis produk Tuna beku dengan negara tujuan ekspor Amerika melalui kapal laut/container.

- PT. Manadomina Citrataruna dengan alamat Kel. Wangurer Timur, Lingk I, Kec. Madidir, Kota Bitung, jenis produk Ikan Kayu dengan negara tujuan ekspor Jepang melalui kapal laut/container.
- PT. Chen Woo Fishery dengan alamat Jl. Jembatan Tua No. 89, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jenis produk tuna beku dengan negara tujuan ekspor Amerika melalui kapal laut/container.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 183,857,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp.23.136.700, realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 12,58%.

### 3. Unit Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan II tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan <10 GT terhadap 6.232 Unit kapal perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung melalui aplikasi Simwaskan maupun belum menggunakan Simwaskan, pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan adalah 2.383 unit kapal perikanan, sedangkan yang belum menggunakan Simwaskan adalah 3.849 Unit kapal perikanan. dengan tingkat presentase penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan 100%. Berdasarkan manual IKU pemeriksaan kapal perikanan yang masuk dalam hitungan capaian IKU ini adalah kapal perikanan <10 GT, sehingga kapal perikanan >10 GT yang telah diperiksa kepatuhannya tidak dimasukkan sebagai capaian IKU.

Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum seluruhnya menerapkan pelayanan kapal perikanan melalui aplikasi Simwaskan karena terkendala jaringan internet di beberapa Wilker PSDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Berikut ini adalah pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan dan yang belum menggunakan Simwaskan:

*Tabel 7. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya melalui Simwaskan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021*

No	UPT/Satwas/Wilker	Kapal Perikanan yang diperiksa Kepatuhannya Melalui Simwaskan
1	Pangkalan PSDKP Bitung	588
2	Satwas SDKP Gorontalo Utara	35
3	Satwas SDKP Gorontalo	122

4	Satwas SDKP Kendari	358
5	Satwas SDKP Makassar	151
6	Satwas SDKP Takalar	355
7	Satwas SDKP Mamuju	82
8	Wilker PSDKP Selayar	15
9	Wilker PSDKP Sinjai	554
10	Wilker PSDKP Tumumpa	123
	<b>Jumlah</b>	<b>2383</b>

*Tabel 8. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya bukan melalui Simwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021*

No.	UPT/SATWAS/WILKER PSDKP	Kapal Perikanan yang Diperiksa Bukan Melalui Simwaskan (manual)
1	<b>Pangkalan PSDKP Bitung</b>	615
2	Wilker PSDKP Amurang	9
3	Wilker PSDKP Belang (Mitra)	68
4	Wilker PSDKP Labuan Uki	45
5	Wilker PSDKP Kema (Minut)	41
6	Wilker PSDKP Tumumpa	128
7	<b>Satwas. SDKP Gorontalo Utara</b>	36
8	Wilker PSDKP Toli-toli	7
9	<b>Satwas. SDKP Gorontalo</b>	116
10	Wilker PSDKP Molibagu	26
11	Wilker PSDKP Parigi Moutong	17
12	Wilker PSDKP Tojo Una-una	29
13	Wilker PSDKP Boalemo	27
14	Wilker PSDKP Pohuwato	10
15	<b>Satwas. SDKP Kendari</b>	379
16	Wilker PSDKP Banggai	9
17	Wilker PSDKP Banggai Keplut	68
18	Wilker PSDKP Bau-bau	139
19	Wilker PSDKP Kolaka	31
20	Wilker PSDKP Pasar Wajo	26
21	Wilker PSDKP Torobulu	6
22	Wilker PSDKP Wakatobi	42
23	<b>Satwas. SDKP Makassar</b>	219
24	Wilker PSDKP Bone	221
25	Wilker PSDKP Palopo	14
26	<b>Satwas. SDKP Takalar</b>	385
27	Wilker PSDKP Bulukumba	147
28	Wilker PSDKP Selayar	19

29	Wilker PSDKP Sinjai	769
30	<b>Satwas. SDKP Mamuju</b>	82
31	Wilker PSDKP Donggala	80
32	Wilker PSDKP Majene	30
33	Wilker PSDKP Mamuju Utara	1
34	Wilker PSDKP Polman	8
<b>Jumlah Unit Kapal Perikanan</b>		<b>3.849</b>

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 657,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp.178.965.200 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 27,24%.

#### 4. Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya

Telah dilakukan pengawasan terhadap 6 (Enam) unit usaha pembudidayaan ikan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- Balo yang beralamat di Desa Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, jenis usaha pembesaran Udang komoditas air payau menggunakan tambak, hasil pengawasan unit usaha Budidaya udang belum memiliki Tanda Pencatatan.
- Kamarudin Hamun memiliki unit usaha budidaya yang beralamat di Desa Mootinelo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis usaha budidaya air payau pembesaran dan pembenihan ikan bandeng, menggunakan tambak sebagai lahan budidaya, hasil pemeriksaan dilapangan unit usaha budidaya tersebut belum memiliki dokumen perizinan.
- Pokdakan Bintang Tumendek memiliki unit usaha budidaya yang beralamat di Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya pembesaran udang vaname menggunakan sistem tambak. Hasil pemeriksaan dilapangan unit usaha budidaya tersebut belum memiliki dokumen perizinan.
- Pokdakan Tomoi memiliki unit usaha budidaya yang beralamat di Desa Alata Karya, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara. Jenis usaha tawar pembesaran ikan Lele dan Nila di Kolam Air Tenang, Lainnya. Hasil pemeriksaan dilapangan, Kelompok Pembudidayaan Ikan Pokdakan Tomoi Belum Dilengkapi Dengan SIUP Ataupun TPUPI. Pelaku Usaha Dihimbau Untuk Melengkapi Usahanya Dengan SIUP/TPUPI..
- Pokdakan mina jaya lestari memiliki unit usaha budidaya yang beralamat di moyag induk, kecamatan kotamobagu timur, kota kotamobagu, provinsi sulawesi utara. Jenis usaha budidaya air tawar pembesaran ikan Nila dan lele. Hasil pemeriksaan dilapangan, Kelompok Pembudidayaan Ikan Pokdakan mina

jaya lestari Belum Dilengkapi Dengan SIUP Atau pun TPUP. Pelaku Usaha Dihimbau Untuk Melengkapi Usahanya Dengan SIUP/TPUP..

- Pokdakan Pisces merupakan unit usaha budidaya yang beralamat di Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air tawar pembenihan ikan nila, koi, dan mas menggunakan kolam air tenang lainnya. Hasil pemeriksaan di lapangan, Kelompok Pembudidaya Ikan Pokdakan Pisces Belum Dilengkapi Dengan SIUP Atau pun TPUP. Pelaku Usaha Dihimbau Untuk Melengkapi Usahanya Dengan SIUP/TPUP.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 481,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp.29.076.996,- realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 6,05%.

### **Sasaran Kegiatan 3:**

#### **Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat didukung oleh IKU Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

#### **IKU3 PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI/ADUAN POKMASWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Pelaksanaan tindak lanjut atas aduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung sampai dengan Triwulan II adalah sebanyak 2 (dua) aduan masyarakat. Aduan yang pertama adalah yang berasal dari Kepala Desa Bobu Kec. Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan dan aduan yang kedua berasal dari Warga Masyarakat Kec. Bunta Kab. Banggai, kedua aduan tersebut terkait adanya aktifitas *destructive fishing*.

Pengaduan masyarakat yang berasal dari Kepala Desa Bobu atas nama Rusli Timpas, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Rusli Timpas melaporkan adanya kegiatan penangkapan ikan di perairan Pulau Peling dengan menggunakan bom ikan melalui telepon seluler kepada personil Wilker PSDKP Bangkeplut, kemudian Tim Gabungan dari PSDKP Bangkeplut bersama Personil Pos POL AIR Banggai Laut bergerak menuju lokasi yang dilaporkan, setibanya dilokasi kejadian terduga pelaku sudah tidak ada ditempat dan hanya ditemukan barang bukti ikan hasil pengeboman yang sudah diamankan oleh aparat Desa Bobu.

Tim Gabungan PSDKP dan POL AIR melakukan pencarian terduga tersangka ke pesisir pantai sampai ke daratan, namun terduga pelaku tidak ditemukan sehingga tim memutuskan untuk Kembali ke kantor dan tetap berkoordinasi dengan pelapor. Pada hari minggu tanggal 11 April 2021 Kepala Desa Bobu Kembali melaporkan bahwa terduga pelaku telah ditemukan oleh aparat Desa Bobu di gunung Taipa dan sudah diserahkan kepada Kepala Desa Bobu. Tim Gabungan Kembali bergerak menuju lokasi kediaman Kepala Desa Bobu Bapak Rusli Timpas dan mengamankan terduga pelaku sebanyak 3 orang untuk diproses lebih lanjut oleh PPNS Pangkalan PSDKP Bitung. Berdasarkan pemeriksaan terhadap 3 orang yang diamankan telah ditetapkan 2 orang sebagai tersangka dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

Gambar 4. Pengamanan Terduga Pelaku *Destructive Fishing* di Wilker PSDKP Bangkeplut



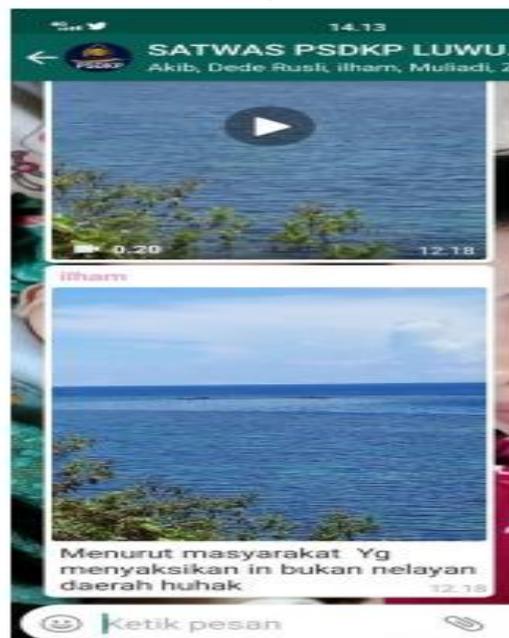
Pengaduan masyarakat yang kedua yang telah ditindak lanjuti adalah pengaduan dari warga masyarakat Kecamatan Bunta atas nama M. Ilham sedang melakukan perjalanan dari Bunta menuju Luwuk menggunakan motor mengaku mendengar suara ledakan di perairan daerah desa Huhak, kecamatan Pagimana menghentikan kendaraanya kemudian mengambil foto dan video perahu-perahu nelayan yang dicurigai melakukan pengeboman ikan. Kemudian foto-foto dan video tersebut langsung dilaporkan kepada petugas Wilker PSDKP Banggai sdr. Nur Taufik melalui Whatsapp dan telepon pada sekitar pukul 12.00 WITA, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Pengawas Perikanan (POLSUS PWP3K))

Pangkalan PSDKP Bitung dan Wilker PSDKP Banggai melakukan pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) ke lokasi. Petugas mencari lokasi sesuai dengan foto-foto dan lokasi yang dilaporkan kemudian melakukan dokumentasi. Selanjutnya petugas mendatangi desa terdekat dengan lokasi guna mencari warga/nelayan yang dapat dimintai informasi dan keterangan terkait laporan tersebut. Wawancara dilakukan kepada saudara Elton (warga desa Huhak, kec. Pagimana) yang berprofesi sebagai nelayan. Beliau mengaku belum pernah mendengar suara ledakan bom di perairan setempat, namun beliau sering menjumpai aktifitas penangkapan ikan menggunakan kompressor yang dilakukan oleh nelayan Bajo dari desa Jaya Bakti, kecamatan Pagimana. Aktifitas biasanya dilakukan pada malam hari dengan hasil tangkapan berbagai macam jenis ikan dengan kondisi utuh (tanpa luka) dalam jumlah banyak (1 bak pickup dalam 1 malam) yang kemungkinan dikirim ke pasar Pagimana (ada indikasi BIUS ikan). Pernah juga dijumpai aktifitas jual beli penyu di daerah itu yang dilakukan juga oleh nelayan-nelayan tersebut. Kemudian, petugas meminta nomor kontak dan memohon kerjasama dengan pak Elton (nomor telepon 081341066908) untuk memberikan informasi lebih lanjut.

Pendekatan dan kerjasama terhadap warga masyarakat di daerah rawan kegiatan destructive fishing dapat terus dilakukan dan dikembangkan untuk mendapatkan informasi yang baik dan akurat. Dengan baiknya informasi yang didapat, diharapkan kegiatan peanggulangan dan pemberantasan *destructive fishing* kedepannya dapat berjalan dengan baik.

Gambar 5. Bukti Pengaduan Masyarakat



Gambar 6. Kegiatan PULBAKET terkait laporan masyarakat



Lokasi yang Dilaporkan

Capaian IKU ini diukur pada setiap Triwulan tahun 2021. Pangkalan PSDKP Bitung pada TW II 2021 sudah melaksanakan tindak lanjut terhadap satu aduan kelompok masyarakat, Sehingga capaian kinerja untuk IKU ini telah tercapai 100%. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 12.600.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp.12.000.000,- realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 95.24%

#### **Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP**

IKU Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

#### **IKU4 PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021 dari target 0,63% tercapai 1,56% dengan persentase capaian kinerja 120% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 9.674.713.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 4.631.842.700 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 47,88%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-4 sebesar 99,81% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-4 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-4 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

*Tabel 9. Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2021*

UPT PSDKP	Kapal Pengawas	Total Hari	Jam Operasi (jam) (t)	Kecepatan Dinas (NM/jam) (V)	Jangkauan Efektif Radar (NM) (d)	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan (Xkp) NM2 (d.V.t.Fwpp.Fkp)	% Cakupan
Pangkalan PSDKP Bitung	Hiu 02	80	911.15	15	15	0,40	0,20	16,400.70	0.85%
	Hiu 05	82	756	15	15	0,40	0,20	13,608.00	0.71%
<i>Persentase capaian Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2021</i>									<b>1,56 %</b>

### **IKU5 PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. pada Triwulan II tahun 2021 dari target 0.29% tercapai 0.24% dengan persentase capaian kinerja 82,76% (Kuning). Penyebab tidak tercapainya target pada triwulan II adalah adanya satu unit Rubber Boat pada Wilker PSDKP Wakatobi yang belum siap beroperasi karena mengalami kerusakan yang lumayan parah pada bagian body sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses perbaikannya.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 2.732.184.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 795.674.812 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 29,12%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-4 IKU 2 sebesar 99,65% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-4 IKU 2 hampir tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-4 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Tabel 10. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2021

No.	NAMA KAPAL	Hari Operasi (hari)	Lama Waktu Pengawasan (jam)	Faktor Koreksi Speedboat (Fsb)	Cakupan (Xsb) (NM2)	Luas WPP NRI (NM2)	Cakupan (%)
			t	Fsb	d*v*t*Fsb	A	X/A
1	Albacore 01	24	115	0,1	460	1.928.506	0,0239%
2	Dolphin 03	14	76	0,1	304	1.928.506	0,0158%
3	Dolphin 19	10	56	0,1	224	1.928.506	0,0116%
4	Dolphin 26	10	50	0,1	200	1.928.506	0,0104%
5	Napoleon 30	22	170	0,1	680	1.928.506	0,0353%
6	Napoleon 31	20	144	0,1	576	1.928.506	0,0299%
7	Napoleon 56	5	26	0,1	104	1.928.506	0,0054%
8	RIB/Sea Rider 06	22	110	0,1	440	1.928.506	0,0228%
9	Rubber Boat Bone	9	57	0,1	228	1.928.506	0,0118%
10	Rubber Boat Kendari	20	110	0,1	440	1.928.506	0,0228%
11	Rubber Boat Luwuk Banggai	10	40	0,1	160	1.928.506	0,0083%
12	Rubber Boat Mamuju Utara	10	53,5	0,1	214	1.928.506	0,0111%
13	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	20	103	0,1	412	1.928.506	0,0214%
14	Rubber Boat Selayar	7	5	0,1	20	1.928.506	0,0010%
15	Rubber Boat Takalar	6	25	0,1	100	1.928.506	0,0052%
16	Rubber Boat Wakatobi			0,1	0	1.928.506	0,0000%
		<b>209</b>	<b>1140,5</b>				<b>0,24%</b>

**Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP**

Capaian Sasaraan Kegiatan 5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: IKU Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

**IKU6 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Sampai dengan Triwulan II tahun 2021 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini, capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2021.

## IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan Triwulan II tahun 2021 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini, capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2021.

### Sasaran Kegiatan 6:

**Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**

## IKU8 PERSENTASE PENYELESAIAN PENYIDIKAN TPKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah menangani 21 Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. 3 (tiga) Perkara sudah dinyatakan Inkracht, 15 (lima belas) Perkara Tahap II, 1 (Satu) Perkara Tahap I, 2 (dua) Perkara dalam proses penyidikan. Capaian kinerja untuk IKU ini adalah 95,00% dari target kinerja 52% di Triwulan II sehingga nilai capaian kinerja untuk IKU ini adalah 120% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 554.000.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 296.990.559 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 53,61%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-6 sebesar 99,71% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-6 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-6 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

*Tabel 11. Penanganan TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021*

NO	NAMA TERSANGKA	PROSES HUKUM	NOMOR SPRINDIK	TANGGAL SPRINDIK	NOMOR SPDP	TANGGAL SPDP	TANGGAL PENYERAHAN BERKAS KE JPU	NOMOR P-21	TANGGAL P-21	Tahap II	TANGGAL TAHAP II
1	AL IMRAN	Inkracht	Print.Sidik.01/PPNS - Lan.5/PW.510/XII/2020	17 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-117/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	121/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
2	RIKIANTO	Inkracht	Print.Sidik.02/PPNS - Lan.5/PW.510/XII/2020	18 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-124/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	122/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
3	ARDIANSYAH	Inkracht	Print.Sidik.03/PPNS - Lan.5/PW.510/XII/2020	18 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-123/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	123/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
4	RAHMAN alias JUMRIN	TAHAP II	Print.Sidik.04/PPNS - Lan.5/PW.510/II/2021	03 Pebruari 2021	7/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 04 Pebruari 2021	15 Pebruari 2021	B-510/P.3.4/Ek u.1/02/2021	25 Pebruari 2021	505/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
5	SUDIRMAN alias DIRMAN	TAHAP II	Print.Sidik.05/PPNS -	03 Pebruari 2021	7/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 04 Pebruari 2021	15 Pebruari 2021	B-509/P.3.4/Ek	25 Pebruari	506/Lan.5/PW.510	08 Maret 2021

			Lan.5/PW.510/III/2021		1			u.1/02/2021	2021	0/III/2021	
6	MUDDING	TAHAP II	Print.Sidik.06/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	09 Pebruari 2021	226/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-563/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	510/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
7	JUMASRI Alias MABE	TAHAP II	Print.Sidik.07/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	09 Pebruari 2021	227/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-565/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	508/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
8	ANWAR Alias ALO	TAHAP II	Print.Sidik.08/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	09 Pebruari 2021	228/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-561/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	509/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
9	M A N I R	TAHAP II	Print.Sidik.09/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	09 Pebruari 2021	229/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-560/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	507/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
10	BADWI	TAHAP II	Print.Sidik.10/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	471/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-577/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	10/PPNS - Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021
11	MOHAMAD	TAHAP II	Print.Sidik.11/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	472/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-580/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	11/PPNS - Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021
12	ANAS alias MOHAMAD ALANG	TAHAP II	Print.Sidik.12/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	473/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-579/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	12/PPNS - Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021
13	ANDI bin ARIADI	TAHAP II	Print.Sidik.13/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	06 Maret 2021	505/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 06 Maret 2021	12 Maret 2021	B-578/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	13/PPNS - Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021
14	KAPTO KAILI	TAHAP II	Print.Sidik.14/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	26 Maret 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 26 Maret 2021	27 Maret 2021	B-591/P.2.18/Eku.1/05/2021	19 Mei 2021	1325/Lan.5/PW.510/VI/2021	14 Juni 2021
15	IKBAL K	TAHAP II	Print.Sidik.15/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	26 Maret 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 26 Maret 2021	27 Maret 2021	B-591/P.2.18/Eku.1/05/2021	19 Mei 2021	1326/Lan.5/PW.510/VI/2021	14 Juni 2021
16	IRWAN THIHA alias IWAN	TAHAP II	Print.Sidik.16/PPNS - Lan.5/PW.510/IV/2021	12 April 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 13 April 2021	26 April 2021	B-419/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	02 Juni 2021	1437/Lan.5/PW.510/VI/2021	15 Juni 2021
17	SARTO B. MALA	TAHAP II	Print.Sidik.17/PPNS - Lan.5/PW.510/IV/2021	12 April 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 13 April 2021	26 April 2021	B-418/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	02 Juni 2021	1438/Lan.5/PW.510/VI/2021	15 Juni 2021
18	ABD AZIZ DG SATTU Alias TISON	TAHAP II	Print.Sidik.18/PPNS - Lan.5/PW.510/IV/2021	14 April 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 15 April 2021	26 April 2021	B-420/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	02 Juni 2021	1439/Lan.5/PW.510/VI/2021	15 Juni 2021
19	FEBSON MAHALING KAMANSING	TAHAP I	Print.Sidik.19/PPNS - Lan.5/PW.510/VI/2021	14 Juni 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 15 Juni 2021	30 Juni 2021	-	-	-	-
20	JORGE QUISTO	PENYIDIKAN	Print.Sidik.20/PPNS - Lan.5/PW.510/VI/2021	28 Juni 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 30 Juni 2021	-	-	-	-	-
21	GILBERT ADVENTAJA DO	PENYIDIKAN	Print.Sidik.21/PPNS - Lan.5/PW.510/VI/2021	28 Juni 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 30 Juni 2021	-	-	-	-	-

## IKU9 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Telah dilakukan penanganan barang bukti dan awak kapal di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan triwulan II 2021 sebanyak 17 Barang Bukti Kapal Perikanan dan 102 Awak Kapal dengan capaian persentase IKU ini adalah 93,29%

dari target triwulan II 50 % sehingga nilai capaian kerja IKU ini adalah 120 % (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 336.640.000,- dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 72.910.000 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 21,66%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-6 sebesar 99,88% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-2 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-6 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Tabel 12. Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

NO	FOTO BARANG BUKTI	NAMA BARANG BUKTI			NAMA TERSANGKA & KEWARGA NEGERAAN	PROSES HUKUM (*)					LOKASI & KONDISI BARANG BUKTI		KETERANGAN
		KAPAL			NAMA	PENYIDIKAN	TAHAP I	TAHAP II	SIDANG	INKRACHT	LOKASI	KONDISI (**)	
		NAMA	GT	KEBANGSAAN									
1		Tanpa Nama	1	Indonesia	AL IMRAN					√		Baik	Di kembalikan ke pemilik
2		KMN. INKAMINA-222/ TRIPLE 2	30	Indonesia	Rahman alias Jumrin					√		Baik	Di kembalikan ke pemilik
3		Tanpa Nama	1	Indonesia	Mudding					√		Baik	Di kembalikan ke pemilik
4		Tanpa Nama	1	Indonesia	Jumasri alias Mabe					√		Baik	Di kembalikan ke pemilik
5		Tanpa Nama	1	Indonesia	Manir					√		Baik	Di kembalikan ke pemilik
6		Tanpa Nama	1	Indonesia	Anwar alias Allo					√		Baik	Di kembalikan ke pemilik

7		KM. Kemitraan Daerah Tertinggal 01/ KPDT Kendari 01	37	Indonesia	Badwi				√	TPI MATANO, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	Baik	
8		KM. Tomini Sejahtera	20	Indonesia	Mohamad				√	TPI MATANO, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	Baik	
9		KM. Inka Mina - 742	34	Indonesia	Anas Bin Mohammad Alang				√	TPI MATANO, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	Baik	
10		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Indonesia	Andi Bin Ariadi				√	TPI MATANO, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	Baik	
11		Perahu Motor Tanpa Nama		Indonesia	Kapto Kaili & Ikkal				√	Kantor Wilker PSDKP Tojo Una-una	Baik	
12		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Indonesia	Irwan Thiha				√	Desa Bobu kab. Banggai Kepulauan	Rusak	
13		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Indonesia	Sarto B. Mala				√	Wilker PSDKP Bangkeplut	Baik	
14		INKA MINA 746	34	Indonesia	Abd Aziz Dg Sattu				√	Pelabuhan Tinakin (Banggai Laut)	Baik	

15		FB.LB JUAN PAOLO UNO	40	FILIPINA	FEBSON M. KAMANSING	√						Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	Baik
16		Fbca YAYA - 3	30	FILIPINA	JORGE QUISTO	√						Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	Baik
17		KASIH 03	2	Indonesia	Gilbert Adventajado	√						Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	Baik

Tabel 13. Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

No	NAMA KAPAL	NAMA AWAK KAPAL	JABATAN	WARGA NEGARA	NOMOR SPRINDIK	TANGGAL SPRINDIK	NOMOR SPDP	TANGGAL SPDP	TANGGAL PENYERAHAN BERKAS KE JPU	NOMOR P-21	TANGGAL P-21	Tahap II	TANGGAL TAHAP II
1	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	AL IMRAN	PEMILIK	INDONESIA	Print.Sidik.0 1/PPNS-Lan.5/PW.5 10/XII/2020	17 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-117/P.4.4/Eku.1/01/2021	20 Januari 2021	121/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
2		RIKIANTO	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.0 2/PPNS-Lan.5/PW.5 10/XII/2020	18 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-124/P.4.4/Eku.1/01/2021	20 Januari 2021	122/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
3		ARDIANSYAH	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.0 3/PPNS-Lan.5/PW.5 10/XII/2020	18 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-123/P.4.4/Eku.1/01/2021	20 Januari 2021	123/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
4	KM. INKAMINA 222/TRIPLE 2	RAHMAN alias JUMRIN	NAKHODA	INDONESIA	Print.Sidik.0 4/PPNS-Lan.5/PW.5 10/III/2021	03 Pebruari 2021	7/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 04 Pebruari 2021	15 Pebruari 2021	B-510/P.3.4/Eku.1/02/2021	25 Pebruari 2021	505/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
5		SUDIRMAN alias DIRMAN	Penanggung Jawab	INDONESIA	Print.Sidik.0 5/PPNS-Lan.5/PW.5 10/III/2021	03 Pebruari 2021	7/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 04 Pebruari 2021	15 Pebruari 2021	B-509/P.3.4/Eku.1/02/2021	25 Pebruari 2021	506/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
6		TISON	KKM	INDONESIA									
7		ACO DILA HAPA	ABK	INDONESIA									
8		ABDUL MALIK UTULI	ABK	INDONESIA									
9		RUSTAM	ABK	INDONESIA									
10		RIZAL PRADITIA	ABK	INDONESIA									
11		HAENDRA WAHYUDI R.	ABK	INDONESIA									
12		SHARUDIN SALAWIALI	ABK	INDONESIA									
13		KAISAR	ABK	INDONESIA									
14	RIDWAN	ABK	INDONESIA										

Dikembalikan ke pihak keluarga

		UTULI											
15		ZUL FAHRIN	ABK	INDONESIA									
16		HENDRA GUNAWAN	ABK	INDONESIA									
17		FAISAL ADRIMAN MAHAUDIN	ABK	INDONESIA									
18		INDRAWAN	ABK	INDONESIA									
19		ARIF	ABK	INDONESIA									
20		TAKWA	ABK	INDONESIA									
21		ARIFIN T. RACHMAN	ABK	INDONESIA									
22		AMAN PAKAYA	ABK	INDONESIA									
23	PERAHU TANPA NAMA	MUDDING	NAKHOD A	INDONESIA	Print.Sidik.06/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	09 Pebruari 2021	226/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-563/P.3.4/Eku.1/03/2021	04 Maret 2021	510/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
24	PERAHU TANPA NAMA	JUMASRI	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.07/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	09 Pebruari 2021	227/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-565/P.3.4/Eku.1/03/2021	04 Maret 2021	508/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
25	PERAHU TANPA NAMA	ANWAR alias ALO	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.08/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	09 Pebruari 2021	228/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-561/P.3.4/Eku.1/03/2021	04 Maret 2021	509/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
26	PERAHU TANPA NAMA	MANIR	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.09/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	09 Pebruari 2021	229/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-560/P.3.4/Eku.1/03/2021	04 Maret 2021	507/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
27	KM. KEMITRAAN DAERAH TERTINGGAL 01/KPDT KENDARI 01	BADWI	NAKHOD A	INDONESIA	Print.Sidik.10/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	471/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-577/P.2.4/Eku.2/03/2021	29 Maret 2021	10/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021
28		IRMAN ATUKA	ABK	INDONESIA									
29		SAKIR	ABK	INDONESIA									
30		ARJUN IGIRISA	ABK	INDONESIA									
31		ABDUL RAHMAN	ABK	INDONESIA									
32		HENDRA GUNAWAN	ABK	INDONESIA									
33		ANTO	ABK	INDONESIA									
34		MUSRAN	ABK	INDONESIA									
35		FARID MALUSINA	ABK	INDONESIA									
36		HERMANS YAH	ABK	INDONESIA									
37	FADLI	ABK	INDONESIA										
38	KM. TOMINI SEJAHTERA	MOHAMAD	NAKHOD A	INDONESIA	Print.Sidik.11/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	472/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-580/P.2.4/Eku.2/03/2021	29 Maret 2021	11/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021
39		ALAMSYAH DJ. HANO	ABK	INDONESIA	SAKSI								
40		ABD. RAHMAN	ABK	INDONESIA	SAKSI								
41		FAHRUL TONGGOL O	ABK	INDONESIA									
42		RUSLAN	ABK	INDONESIA									
43		USMAN RAHIM	ABK	INDONESIA									
44		ZAENAL	ABK	INDONESIA									
45		FADLI	ABK	INDONESIA									
46		ASTAR	ABK	INDONESIA									
47		JUNAIDI	ABK	INDONESIA									
48		SYAIFUDIN	ABK	INDONESIA									
49		ASMAL	ABK	INDONESIA									
50	KM. INKA MINA 742	ANAS BIN MOHAMMAD ALANG	NAKHOD A	INDONESIA	Print.Sidik.12/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	473/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-579/P.2.4/Eku.2/03/2021	29 Maret 2021	12/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021

Dikembalikan ke pihak keluarga

Dikembalikan ke pihak keluarga

51		ARDIANTO	ABK	INDONESIA	SAKSI	Dikembalikan ke pihak keluarga							
52		ARWAN A.	ABK	INDONESIA	SAKSI								
53		SAHRIL	ABK	INDONESIA									
54		DIRWANTO	ABK	INDONESIA									
55		ARMAN	ABK	INDONESIA									
56		FAISAL	ABK	INDONESIA									
57		BAHTIAR	ABK	INDONESIA									
58		ASRI A. ASRINTING	ABK	INDONESIA									
59		SAIPUL	ABK	INDONESIA									
60		ADI KURNIAWAN	ABK	INDONESIA									
61		BAGONG	ABK	INDONESIA									
62		GUNAWAN MUH. GUNTUR	ABK	INDONESIA									
63		KAISAR	ABK	INDONESIA									
64		DARWIS	ABK	INDONESIA									
65		MULIADI	ABK	INDONESIA									
66		HAMDAR HATTAB HADDAD	ABK	INDONESIA									
67		ASRUN	ABK	INDONESIA									
68		RAMDAN LAMELE	ABK	INDONESIA									
69	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	ANDI BIN ARIADI	NAKHODA	INDONESIA	Print.Sidik.13/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021								
70	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	KAPTO KAILI	PEMILIK / NAKHODA	INDONESIA	Print.Sidik.14/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	26 Maret 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 26 Maret 2021	7 April 2021	B-591/P.2.18/Eku.1/05/2021	19 Mei 2021	1325/Lan.5/PW.510/VI/2021	14 Juni 2021
71		IKBAL K	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.15/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	26 Maret 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 26 Maret 2021	7 April 2021	B-590/P.2.18/Eku.1/05/2021	19 Mei 2021	1326/Lan.5/PW.510/VI/2021	14 Juni 2021
72	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	IRWAN THIHA alias IWAN	PEMILIK / NAKHODA	INDONESIA	Print.Sidik.16/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	12 April 2021	851/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	Tanggal 13 April 2021	26 April 2021	B-419/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	2 Juni 2021	1438/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021	15 Juni 2021
73	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	SARTO B. MALA	PEMILIK / NAKHODA	INDONESIA	Print.Sidik.17/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	12 April 2021	852/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	Tanggal 13 April 2021	26 April 2021	B-418/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	2 Juni 2021	1439/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021	15 Juni 2021
74	KM. INKAMINA 746	ABD. AZIS DG. SATTU alias TISON	NAKHODA	INDONESIA	Print.Sidik.18/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	14 April 2021	838/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	Tanggal 15 April 2021	26 April 2021	B-420/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	2 Juni 2021	1437/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021	15 Juni 2021
75		ARWIS	ABK	INDONESIA	SAKSI	Dikembalikan ke pihak keluarga							
76		FAISAL H. LATTA	ABK	INDONESIA	SAKSI								
77		TARZAN	ABK	INDONESIA									
78		LA USA	ABK	INDONESIA									
79		UCOK	ABK	INDONESIA									
80		MAMING	ABK	INDONESIA									
81		KIWA	ABK	INDONESIA									
82		KIAN	ABK	INDONESIA									
83		MARLON	ABK	INDONESIA									
84	TAYUNG	ABK	INDONESIA										
85	LASO	ABK	INDONESIA										
86	WAWAN	ABK	INDONESIA										
87	FB. LB. JUAN PAOLO UNO	FEBSON MAHALING KAMANSING	NAKHODA	FILIPINA	Print.Sidik.19/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	14 Juni 2021	1444/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	Tanggal 15 Juni 2021	30 Juni 2021				

88		RUEL FLORES BERO	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
89		JULIANO ANTIN ABIL JR.	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
90		TIMIE DULAR DIGAM	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
91	FBca. YAYA-3	JORGE QUISTO	NAKHOD A	FILIPINA	Print.Sidik.20/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	28 Juni 2021	1543/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	Tanggal 30 Juni 2021						
92		NILO MAGALLIANES	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
93		NICK M. TRASPORTE	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
94		MARIO PACULBA	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
95		JERSON N. CONGCONG	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
96	KM. KASIH 03	GILBERT ADVENTAJ ADO	NAKHOD A	INDONESIA	Print.Sidik.21/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	28 Juni 2021	1544/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	Tanggal 30 Juni 2021						
97		JANIL LABAJA	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
98		GASPAR LABAJA	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
99		DANILO LABOJO, JR	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
100		LINDON LABAJA	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
101		JUNRY LABAJA	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								
102		DANILO LABOJO, SR	ABK	FILIPINA		Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung								

### Sasaran Kegiatan 7:

#### Tata kelola pemerintahan yang baik

Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu, dengan rincian sebagai berikut:

#### **IKU10 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO (SURAT LAIK OPERASI) KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2021, hasil dari survey kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanan SLO dilaksanakan melalui media elektronik diseluruh wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung sampai ke Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Hasil survey pada Triwulan II tahun 2021 adalah 84,95 dari target di triwulan II adalah 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan SLO adalah 106,19% (hijau) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan SLO TW II tahun 2021

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3,382	sangat baik	0,375	84,551
U2	Prosedur	3,230	baik	0,359	82,022
U3	Waktu Pelayanan	3,180	baik	0,353	79,494
U4	Biaya/Tarif	3,629	sangat baik	0,403	97,727
U5	Produk Layanan	3,348	sangat baik	0,372	83,708
U6	Kompetensi Pelaksana	3,444	sangat baik	0,382	86,517
U7	Perilaku Pelaksana	3,427	sangat baik	0,380	85,674
U8	Sarana dan Prasarana	3,298	sangat baik	0,366	73,034
U9	Pengaduan Masyarakat	3,674	sangat baik	0,408	91,854
<b>Rata - Rata Semua Unsur</b>				<b>3,398</b>	
<b>Keterangan :</b> - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur Pelayanan - NRR = Nilai rata-rata - IKR = Indeks Kepuasan Responden - *) = Jumlah NRR IKR tertimbang - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111					
<b>IKR TERHADAP RSS :</b>				<b>84,95</b>	
<b>Mutu Pelayanan :</b> A (Sangat Memuaskan) : 81,26 - 100,00 B (Memuaskan) : 62,51 - 81,25 C (Kurang Memuaskan) : 43,76 - 62,50 D (Tidak Memuaskan) : 25,00 - 43,75					

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 19.050.000,- dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 0 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 0%, hal ini karena pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada TW I dan TW II dilaksanakan hanya menggunakan kuisisioner media elektronik sehingga belum ada realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan IKM pengguna layanan SLO pada lingkup Pangkalan PSDKP Bitung secara tatap muka. Anggaran tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan IKM dan konsultasi Publik yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021.

### **IKU11 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI (LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2021, hasil dari survey kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanan LVHPI dilaksanakan melalui media elektronik diseluruh wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung sampai ke Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP

Bitung. Hasil survey pada Triwulan II tahun 2021 adalah 84,95 dari target di triwulan II adalah 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan LVHPI adalah 106,19% (hijau) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

*Tabel 15. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TW II tahun 2021*

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3,382	<b>sangat baik</b>	0,375	84,551
U2	Prosedur	3,230	<b>baik</b>	0,359	82,022
U3	Waktu Pelayanan	3,180	<b>baik</b>	0,353	79,494
U4	Biaya/Tarif	3,629	<b>sangat baik</b>	0,403	97,727
U5	Produk Layanan	3,348	<b>sangat baik</b>	0,372	83,708
U6	Kompetensi Pelaksana	3,444	<b>sangat baik</b>	0,382	86,517
U7	Perilaku Pelaksana	3,427	<b>sangat baik</b>	0,380	85,674
U8	Sarana dan Prasarana	3,298	<b>sangat baik</b>	0,366	73,034
U9	Pengaduan Masyarakat	3,674	<b>sangat baik</b>	0,408	91,854
<b>Rata - Rata Semua Unsur</b>				<b>3,398</b>	
<b>Keterangan :</b> - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur Pelayanan - NRR = Nilai rata-rata - IKR = Indeks Kepuasan Responden - *) = Jumlah NRR IKR tertimbang -**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111					
<b>IKR TERHADAP RSS :</b>				<b>84,95</b>	
<b>Mutu Pelayanan :</b> <b>A (Sangat Memuaskan) : 81,26 - 100,00</b> <b>B (Memuaskan) : 62,51 - 81,25</b> <b>C (Kurang Memuaskan) : 43,76 - 62,50</b> <b>D (Tidak Memuaskan) : 25,00 - 43,75</b>					

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 19.050.000,- dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 0 realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 0%, hal ini karena pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada TW I dan TW II dilaksanakan hanya menggunakan kuisisioner media elektronik sehingga belum ada realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan IKM pengguna layanan LVHPI pada lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Anggaran tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan IKM dan konsultasi Publik yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021.

### **IKU12 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada TW IV 2021.

### **IKU13 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah 69,24%, dari target pada Triwulan II 2021 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 65%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 106,52 % (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 124.200.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp. 19.123.809,- realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 15,40%. Efisiensi penggunaan anggaran untuk menunjang kegiatan ini adalah 99,86%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian IKU ini telah efektif dan efisien dengan tidak menggunakan seluruh anggaran yang tersedia telah bisa mencapai target yang ditetapkan pada TW II tahun 2021.

### **IKU14 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

### **IKU15 INOVASI GUGUS KERJA TRANSFORMASI YANG DIHASILKAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

### **IKU16 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021..

### **IKU17 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021 .

### **IKU18 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian IKU ini di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah 100%, dari target Triwulan II 2021 di Pangkalan

PSDKP Bitung sebesar 84%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 119,05 % (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 25.327.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp.401.000,- realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 1,58%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-7 sebesar 99,99% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-7 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-7 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

#### **IKU19 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah 71,85%, dari target Triwulan II 2021 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 80%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 89,81 % (kuning). Tidak tercapainya Indikator Kinerja ini karena beberapa faktor diantaranya adalah pelaksanaan revisi anggaran sampai dengan TW II ini telah dilaksanakan sebanyak empat kali, sementara dalam formulasi perhitungan IKPA revisi dilaksanakan paling banyak satu kali disetiap triwulan, kemudian adanya keterlambatan dalam SPJ TUP dan GUP. Serta adanya kesalahan/retur SPM dalam pengelolaan keuangan sehingga mempengaruhi terhadap rendahnya capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 51.450.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp. 13.959.400,- realisasi anggaran sampai dengan TW II adalah 1,58%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-7 sebesar 99,99% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien

#### **IKU20 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

### 3.3. Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 adalah Rp. 44,396,268,000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 36,94%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2021

No	Kode   Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2350   Pemantauan , Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20.904.139.000	6.442.631.393	30,81
2.	2351   Penyelesaian TPKP	890.640.000	369.900.559	41,53
3.	2352   Operasional Pengawasan SDK	948.000.000	165.297.850	17,43
4.	2353   Operasional Pengawasan SDP	1.671.149.000	403.233.596	24,12
5.	2355   Dukungan Manajemen	19.982.340.000	9.020.708.809	45,14
<b>Total</b>		<b>44,396,268,000</b>	<b>16.401.772.207</b>	<b>36,94</b>

# BAB 4

## PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 111,51. 20 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 10 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) 2 Indikator Kinerja tercapai (kuning) dan 8 indikator Kinerja belum dapat di nilai karena baru akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan IV tahun 2021. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021 dapat tercapai semuanya.

### 4.2. Rekomendasi

#### Saran

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang belum mencapai nilai maksimal, hal tersebut guna meningkatkan nilai capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

#### Rencana Tindaklanjut

Melakukan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja pada Triwulan III tahun 2021 secara terarah dan terukur.

# LAMPIRAN



## **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung  
Triwulan I Tahun 2021